

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa reformasi kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia, teknologi sektor publik semakin berkembang khususnya pada pemerintahan daerah (Eprilianto, dkk. 2019). Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi informasi yang membantu masyarakat dalam mengolah data dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Untuk mencapai tujuannya, setiap instansi atau perusahaan pasti membutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur seluruh proses yang ada di kantor atau perusahaan tersebut. Mulai dari mengumpulkan, mengirim, memasukkan, mengolah dan menyimpan informasi mengenai peristiwa keuangan atau peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas organisasi sehari-hari untuk mempercepat kerja (Pasaribu, 2021).

Pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik harus mampu memberikan pelayanan secara efektif. Masyarakat saat ini memerlukan tata kelola yang baik dari organisasi pemerintah karena dengan tata kelola yang baik dapat menciptakan strategi institusi sosial yang kuat dan juga menjadikan pemerintahan lebih terbuka, responsif, bertanggungjawab, dan demokratis (Warsito, 2014,). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah erat kaitannya dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diluncurkan pada tanggal 29 Agustus 2006. SIMDA Merupakan sistem informasi yang

dibangun dan dikembangkan untuk memudahkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja (Suci, dkk., 2022). BPKP berperan sebagai pengembang kewenangan pengendalian auditor internal dan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Dalam perkembangan, SIMDA keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SIMDA di Kabupaten Belu. Namun, SIMDA ini ada karena sudah adanya perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Belu. Namun, SIMDA ini diatur dalam Perda Kabupaten Belu No. 5 Tahun 2023 tentang APBD yang membantu pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Menurut Hertanto, dkk. (2017), SIMDA merupakan produk penerapan prinsip *e-governance* yang mulai muncul sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yaitu sehubungan dengan *e-governance* nasional. Strategi pembangunan yang kemudian diciptakan untuk mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi manajemen ini dikembangkan untuk memudahkan kegiatan instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan ekonomis. Aplikasi SIMDA sangat sederhana, aplikasi ini dapat mendukung seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, serta struktur

anggaran, pengelolaan dan akuntansi, proses pelaporan dan pelaporan (BPKP, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arman, dkk, (2022) menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah lebih mudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terstruktur, mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA jauh lebih baik dari sistem manual, yang dapat dilihat dari karakteristik pengukuran kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan aplikasi SIMDA yang memiliki fitur-fitur yang komprehensif dapat membantu menghasilkan laporan keuangan seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA); Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); Surat Penyediaan Dana (SPD); Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Perintah Membayar (SPM); Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Surat Tanda Setoran (STS); Jurnal; Buku Besar; Buku Pembantu; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Arus Kas; dan Neraca (Hastita, 2019), sehingga dengan adanya SIMDA apabila di input secara benar, teliti, melalui proses yang transparan dan keamanan data yang terjamin bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, relevan dan dapat diandalkan (Manossoh,2016).

Dinas Pertanian Kabupaten Belu sudah menggunakan aplikasi SIMDA sejak tahun 2016. Sebelum tahun 2016, *database* pelaporan belum *online* sehingga proses ekspor-impor data diproses dengan cara memindahkan data melalui *flashdisk*, namun *output* yang disajikan dari aplikasi ini sangat sistematis daripada pelaporan dengan manual ataupun melalui excell. Sejak tahun 2016, SIMDA sudah menggunakan *database online*, sehingga bisa diakses di mana saja dan bisa melihat data maupun informasi keuangan secara keseluruhan. Akan tetapi, masih ada kendala yang dihadapi selama penggunaan SIMDA pada Dinas Pertanian Kabupaten Belu seperti adanya keterbatasan Informasi Teknologi (IT) dalam hal ini kendala pada jaringan dan server yang sering *error* mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara saldo tunai dan rekening koran dalam melakukan transaksi sehingga sering terjadi data yang diinput terbaca secara berulang pada aplikasi SIMDA. Hal ini terjadi karena banyak instansi yang mengakses aplikasi ini. Sehingga untuk memperbaiki masalah tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Belu harus mengkoordinasi dan memverifikasi kepada BPKAD dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang lama dan harus menyertakan dengan bukti memo kesalahan penginputan transaksi tersebut. Mekanisme perbaikan tersebut dengan cara staf keuangan pada dinas pertanian melaporkan kesalahan kepada pihak BPKAD khususnya pada bagian IT, kemudian Tim IT melakukan analisis awal terhadap laporan kesalahan. Selanjutnya tim IT akan melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk verifikasi lebih lanjut kesalahan yang terjadi dengan melihat memo yang diberikan, kemudian Tim IT memperbaiki kesalahan dan menginformasikan pengguna terkait status perbaikan.

Selain jaringan dan server yang sering error, dilihat juga dari kurang transparan laporan keuangan yang diberikan kepada para pengguna laporan dimana laporan keuangan yang ada pada Dinas Pertanian mulai dari 2018-2020 saja, sedangkan tahun berikutnya laporan keuangan yang seharusnya dimiliki oleh Dinas Pertanian tidak memiliki laporan keuangan. Dengan jaringan dan server yang sering error yang menyebabkan Dinas Pertanian kurang transparan dalam laporan keuangan menyebabkan aplikasi SIMDA ini mengalami transformasi yang awalnya dinas pertanian menggunakan SIMDA sebagai sistem untuk membantu mengelola keuangan pada dinas pertanian, pada tahun 2024 dinas pertanian sudah menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai pengganti dari aplikasi SIMDA.

Pergantian SIMDA ke SIPKD ini dikarenakan masa kerja sama antara BPKP dengan pemerintah telah selesai dan dikarenakan server SIMDA yang sering error menyebabkan pemerintah untuk mengganti sistem keuangan dengan meningkatkan fitur-fitur dalam pengelolaan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih transparan karena menggunakan teknologi lebih baik dibandingkan dengan SIMDA. Oleh karena itu, adanya fenomena tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bertujuan untuk menganalisis tentang **“Dampak Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Belu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana dampak implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Belu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Belu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang SIMDA Keuangan, dan kualitas informasi serta laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan SIMDA Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

### **3. Bagi Pembaca**

Sebagai bahan acuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi dalam proses penyusunan tugas akhir selanjutnya.